



Pengaruh Kemandirian Fiskal, Belanja Operasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Rina Chrisnawati¹, Etik Umiyati², Rosmeli³
Universitas Jambi¹, Universitas Jambi², Universitas Jambi³

*Corresponding author, email; Chrisnawati10@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

ac.id/index.php/JSE

Keywords:

Fiscal Independence, Operating Expenditure, Labor Force, Economic Growth, Panel Data, Indonesia

Turabian style in citing this

article: [citation Heading]

Rina Chrisnawati, Etik Umiyati, dan Rosmeli,

“Pengaruh Kemandirian Fiskal, Belanja Operasi dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.”

Journal of Sharia Economics 7, No. 1 June: 2025

Economics 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the development and the influence of fiscal independence ratio, operating expenditure ratio, and labor force on economic growth in 34 provinces in Indonesia during the period 2020–2024. The analysis method employed is panel data regression using the Fixed Effects Model (FEM) approach, following the results of the Chow test and Hausman test. The results show that the fiscal independence ratio has a positive and significant effect on economic growth. The operating expenditure ratio also has a positive and significant effect on economic growth. Meanwhile, the labor force variable has a negative but insignificant effect on economic growth. The Adjusted R-Square value of 0.6890 indicates that the three independent variables together can explain 68.90 percent of the variation in economic growth. Descriptively, the 2020–2024 period was marked by economic contraction due to the Covid-19 pandemic in 2020, followed by strong recovery in 2021–2022 and stabilization in 2023–2024. There is a clear disparity between regions, where Java Island dominates fiscal independence and labor absorption, while eastern Indonesia shows high economic growth driven by the mining sector but still has low fiscal independence.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahuluan

Indonesia menargetkan tahun 2045 sebagai tonggak transformasi menuju negara maju melalui visi Indonesia Emas 2045. Agenda tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai pilar utama pembangunan nasional, khususnya dalam upaya keluar dari middle-income trap dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menegaskan bahwa pencapaian visi tersebut memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan¹. Dalam konteks tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa

¹ Kementerian PPN/Bappenas, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Indonesia Emas 2045 (Rancangan Akhir / Publikasi). Bappenas. .”

Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6–8 persen per tahun agar mampu mencapai status negara maju pada tahun 2045².

Namun demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan kecenderungan moderat. Berdasarkan data World Bank tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020–2024 relatif stabil pada kisaran 5 persen, tetapi belum mampu melampaui beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi pada periode pemulihan pascapandemi. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen akibat pandemi COVID-19, meskipun angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan Filipina sebesar -9,52 persen dan Malaysia sebesar -5,46 persen³. Selanjutnya, pada periode pemulihan tahun 2021–2022, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 3,7 persen dan meningkat menjadi 5,31 persen pada tahun 2022. Akan tetapi, laju pertumbuhan tersebut masih berada di bawah Vietnam yang mampu tumbuh sebesar 8,54 persen pada tahun 2022.

Pada periode 2023–2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menunjukkan stabilitas di kisaran 5 persen, yakni sebesar 5,05 persen pada tahun 2023 dan 5,03 persen pada tahun 2024. Stabilitas tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan global, tetapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mencapai akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi sebagaimana ditargetkan dalam agenda pembangunan nasional. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam perekonomian Indonesia, terutama terkait efektivitas kebijakan fiskal, kualitas belanja pemerintah, serta kapasitas daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif⁴.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makro nasional, tetapi juga oleh kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat⁵. Daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam

² Digdowiseiso, "Four Decades of Research in Fiscal Decentralization: A Bibliometric and Content Analysis."

³ World Bank, "Running Faster, for Longer: Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs (Indonesia Country Growth and Jobs Report)."

⁴ World Bank.

⁵ Kuncoro, "Desentralisasi Fiskal Sebagai Alternatif Menggali Sumber Dana Pembangunan Dan Mewujudkan Otonomi Daerah."

menentukan prioritas pembangunan, memperluas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas infrastruktur ekonomi daerah.

Secara teoritis, kapasitas fiskal daerah memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Musgrave dan Musgrave menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah merupakan instrumen utama dalam mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan menjaga stabilitas ekonomi⁶. Sejalan dengan itu, Oates (2005) menegaskan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat akan lebih efektif dalam menyediakan barang publik dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi antarwilayah⁷.

Dalam konteks Indonesia, tingkat kemandirian fiskal antarprovinsi masih menunjukkan disparitas yang cukup tinggi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki rasio kemandirian fiskal yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 69,56 persen, 68,99 persen, dan 66,91 persen⁸. Tingginya rasio tersebut mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah serta optimalisasi PAD yang berasal dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sebaliknya, beberapa daerah lain masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat. Kalimantan Tengah, misalnya, hanya memiliki rasio kemandirian fiskal sebesar 32,79 persen pada tahun 2024. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah di Indonesia masih belum merata.

Meskipun demikian, tingginya kemandirian fiskal belum tentu secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Efektivitas kapasitas fiskal daerah juga dipengaruhi oleh struktur pengeluaran pemerintah daerah, khususnya proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Dalam perspektif keuangan publik, belanja daerah yang terlalu didominasi oleh pengeluaran rutin dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif⁹. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghimpun pendapatan, tetapi juga oleh efisiensi dan kualitas alokasi anggaran.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa struktur belanja daerah di Indonesia selama periode 2020–2024 masih didominasi oleh belanja operasi. Beberapa provinsi bahkan mencatat rasio belanja operasi di atas 80 persen, seperti DKI Jakarta dan Papua pada periode tertentu¹⁰. Tingginya proporsi belanja

⁶ Musgrave and Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*.

⁷ Hanif, Wallace, and Gago-de-Santos, "Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries."

⁸ Kemenkeu, "Portal Data APBD."

⁹ Halim, *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah"*.

¹⁰ Kemenkeu, "Portal Data APBD."

operasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan dibandingkan pengeluaran produktif yang mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas struktur belanja pemerintah daerah.

Penelitian empiris sebelumnya menunjukkan bahwa komposisi belanja pemerintah memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Amri dkk menemukan bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang lebih produktif mampu meningkatkan output ekonomi regional secara lebih optimal¹¹. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Andersson dan Värja yang menunjukkan bahwa daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi oleh pengeluaran rutin. Oleh karena itu, rasio belanja operasi menjadi variabel penting dalam menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi¹².

Selain faktor fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ketenagakerjaan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang menentukan kapasitas output suatu wilayah¹³. Namun demikian, besarnya jumlah tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh tingginya pertumbuhan ekonomi apabila produktivitas tenaga kerja masih rendah dan penyerapan tenaga kerja formal belum optimal.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk bekerja di Indonesia meningkat dari 138,22 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 152,10 juta jiwa pada tahun 2024¹⁴. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi daerah dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia. Akan tetapi, tingginya jumlah tenaga kerja tersebut belum tentu mencerminkan tingginya produktivitas ekonomi daerah. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. World Bank mencatat bahwa tingkat informalitas tenaga kerja Indonesia masih berada pada kisaran 59–60 persen, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam proses transformasi struktural ekonomi nasional¹⁵.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas penyerapan tenaga kerja dan produktivitas ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, kapasitas fiskal pemerintah daerah menjadi penting

¹¹ Irmanelly et al., "Economic Growth Inclusivity in Sumatra Province."

¹² Andersson and Värja, "The Composition of Local Government Expenditure and Income Growth: The Case of Sweden."

¹³ Todaro and Smith, *Economic Development (13th Ed.)*.

¹⁴ BPS, *Ketenagakerjaan Provinsi, 2024*.

¹⁵ World Bank, "Indonesia Economic Prospects."

karena dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja produktif melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan sektor ekonomi daerah. Penelitian Lestari dkk menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah yang lebih baik cenderung meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi regiona¹⁶.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, khususnya kapasitas fiskal daerah, struktur belanja pemerintah, dan kondisi ketenagakerjaan. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih lebih banyak menyoroti aspek fiskal dan belum banyak mengintegrasikan dimensi tenaga kerja dalam model analisis pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh kemandirian fiskal, belanja operasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Integrasi ketiga variabel tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

B. Landasan Teori

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Menurut Sarundajang, desentralisasi mencakup pelimpahan kewenangan legislatif, administratif, maupun yudikatif dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah¹⁷. Kebijakan ini berbeda dengan dekonsentrasi karena pada desentralisasi tanggung jawab juga ikut dialihkan kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan harus diikuti dengan pengalihan pembiayaan, sarana, serta sumber daya manusia¹⁸. Kebijakan otonomi daerah lahir sebagai bagian dari reformasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Mardiasmo menjelaskan bahwa dominasi pemerintah pusat pada masa sebelumnya menyebabkan daerah hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada pelayanan masyarakat¹⁹.

¹⁶ Lestari, Ni Wayan, and Budhi, "PENGARUH JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA, INVESTASI DAN REMITANSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA."

¹⁷ Sarundajang, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.

¹⁹ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*.

Dalam perspektif teori federalisme fiskal, Oates menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal sehingga alokasi sumber daya akan lebih efisien apabila sebagian kewenangan fiskal diserahkan kepada daerah²⁰. Konsep ini dikenal sebagai *Decentralization Theorem*. Selain meningkatkan efisiensi, desentralisasi fiskal juga mendorong akuntabilitas dan kompetisi antar daerah dalam meningkatkan pelayanan publik²¹.

Di Indonesia, penguatan desentralisasi fiskal terus berkembang hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini menitikberatkan pada penguatan pajak daerah, pengurangan ketimpangan fiskal, peningkatan kualitas belanja, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah²². Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya bertujuan memperluas otonomi daerah, tetapi juga meningkatkan efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah yang tercermin melalui kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui persentase perubahan PDRB riil dari satu periode ke periode berikutnya. Secara operasional, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan output dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan²³.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil karena telah menghilangkan pengaruh inflasi²⁴. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.

Rumus pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$g_t = \left(\frac{PDRB_t}{PDRB_{t-1}} - 1 \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- g_t = laju pertumbuhan ekonomi
- $PDRB_t$ = PDRB tahun berjalan
- $PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

²⁰ Hanif, Wallace, and Gago-de-Santos, "Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries."

²¹ Qian and Roland, "Federalism and the Soft Budget Constraint."

²² Lewis, "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment."

²³ Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*.

²⁴ BPS, "STATISTIK INDONESIA 2024."

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti modal, tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan fiskal. Dalam teori neoklasik Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dan inovasi sebagai penggerak pertumbuhan jangka panjang.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikemukakan Adam Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pembagian kerja (*division of labour*), akumulasi modal, dan perluasan pasar²⁵. Semakin tinggi spesialisasi tenaga kerja, maka produktivitas ekonomi akan meningkat.

David Ricardo kemudian menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam²⁶. Ricardo menekankan adanya *law of diminishing returns* yang menyebabkan pertumbuhan dapat melambat apabila sumber daya terbatas. Secara sederhana hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = f(K, L, T)$$

Keterangan:

Y = output ekonomi

K = modal

L = tenaga kerja

T = tanah/sumber daya alam

Teori Keynesian menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat. Ketika permintaan menurun, pemerintah perlu meningkatkan belanja untuk mendorong aktivitas ekonomi. Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebaga²⁷i:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

C = konsumsi

I = investasi

²⁵ Ehrenberg and Smith, *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*.

²⁶ Sambodo et al., *Diskursus Kebijakan Pembangunan*.

²⁷ Sambodo et al.

G = pengeluaran pemerintah

X-M = ekspor neto

Sementara itu, model Solow-Swan menempatkan modal dan tenaga kerja sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Teori pertumbuhan endogen Romer menegaskan bahwa investasi pada modal manusia dan inovasi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengalami *diminishing returns*²⁸.

4. Teori Keuangan Daerah dan Kinerja Fiskal

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Davey membagi sumber keuangan daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah²⁹.

Menurut Mardiasmo, kesehatan keuangan daerah dapat diukur melalui rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio ketergantungan fiskal, dan rasio belanja modal³⁰. Analisis rasio keuangan daerah digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan efisien.

Rasio kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan daerah membiayai pembangunan menggunakan PAD tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin kuat tingkat otonomi fiskal daerah³¹. Rumus rasio kemandirian adalah:

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Rasio tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

5. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial³². Belanja ini bersifat konsumtif karena tidak secara langsung menghasilkan aset tetap atau investasi jangka panjang.

Dominasi belanja operasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk melakukan belanja produktif seperti pembangunan

²⁸ Sambodo et al.

²⁹ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*.

³⁰ Mardiasmo.

³¹ Saddam et al., "Determinants of Islamic Banks' Stability in Malaysia and Indonesia."

³² Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

infrastruktur. Oleh karena itu, proporsi belanja operasi sering digunakan untuk menilai efisiensi struktur APBD³³.

Rasio belanja operasi dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio belanja operasi menunjukkan semakin besar anggaran yang digunakan untuk pengeluaran rutin dibandingkan investasi pembangunan.

6. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk usia kerja yang mampu dan bersedia melakukan kegiatan ekonomi. Menurut International Labour Organization (ILO), tenaga kerja mencakup penduduk yang bekerja, mencari pekerjaan, maupun siap bekerja³⁴. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik menetapkan tenaga kerja sebagai penduduk berusia 15 tahun ke atas³⁵.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja merupakan faktor produksi utama bersama modal dan teknologi. Becker menjelaskan bahwa kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan sebagai bentuk investasi human capital³⁶. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin tinggi pula produktivitas ekonomi.

Teori Keynes juga menekankan bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan agregat. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, permintaan tenaga kerja juga meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi³⁷. Oleh karena itu, tenaga kerja menjadi salah satu variabel penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Hubungan Antar Variabel

Kemandirian fiskal memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena daerah yang mandiri secara fiskal memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran pembangunan³⁸. Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat dapat membatasi ruang gerak pemerintah daerah.

³³ Mahmudi.

³⁴ Handari and Isnandar, "Indikator Pasar Tenaga Kerja Di Indonesia Berdasarkan Kerangka Key Indicators of the Labour Market (KILM)."

³⁵ BPS, *KetenagaKerjaan Provinsi, 2024*.

³⁶ Baye and Kreitner, *The Economics of Human Capital in the Knowledge Economy*.

³⁷ Mankiw, *Macroeconomics*.

³⁸ Nugrah, Jumriani, and Firmansyah, "ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE."

Belanja operasi secara teoritis dapat memberikan dampak jangka pendek melalui peningkatan konsumsi masyarakat, tetapi apabila porsiya terlalu besar dapat mengurangi belanja produktif sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang³⁹.

Tenaga kerja juga memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja produktif yang terserap dalam kegiatan ekonomi, maka semakin besar pula kapasitas produksi dan output daerah⁴⁰.

C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel yang merupakan gabungan antara data time series periode 2020–2024 dan data cross section 34 provinsi di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Variabel yang digunakan terdiri atas pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, serta rasio kemandirian fiskal, rasio belanja operasi, dan tenaga kerja sebagai variabel independen.

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel penelitian selama periode pengamatan. Menurut Ghazali, statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data tanpa digunakan untuk pengujian hipotesis. Perkembangan variabel dihitung menggunakan rumus pertumbuhan tahunan dengan membandingkan nilai suatu variabel pada tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya⁴¹.

Untuk menganalisis pengaruh rasio kemandirian fiskal, rasio belanja operasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan analisis regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 KFit + \beta_2 BO_{it} + \beta_3 TK_{it} + \epsilon_{it}$$

di mana Y merupakan pertumbuhan ekonomi, KF adalah rasio kemandirian fiskal, BO adalah rasio belanja operasi, TK adalah tenaga kerja, β_0 merupakan konstanta, β_1 – β_3 adalah koefisien regresi, dan ϵ adalah error term.

Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM), serta Uji Hausman untuk memilih model yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Model yang terpilih selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis.

³⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

⁴⁰ Ehrenberg and Smith, *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*.

⁴¹ Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model regresi diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera*, uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF), uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, dan uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Breusch-Pagan*. Pengujian asumsi klasik bertujuan memastikan model memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) sehingga menghasilkan estimasi yang efisien dan dapat diandalkan⁴².

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi, uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, serta koefisien determinasi (Adjusted R²) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Indonesia⁴³.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Variabel Penelitian

Selama periode 2020–2024, pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia menunjukkan tren pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Kawasan Maluku dan Papua mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan pertumbuhan mencapai 11,04% pada tahun 2024. Pada tingkat provinsi, Maluku Utara menjadi daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 16,12%, diikuti Sulawesi Tengah sebesar 10,71% dan Papua sebesar 6,97%. Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut didukung oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Rasio kemandirian fiskal menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode penelitian. Kawasan Jawa memiliki tingkat kemandirian fiskal tertinggi, sedangkan Maluku dan Papua masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transfer pemerintah pusat. Pada tingkat provinsi, DKI Jakarta memiliki rata-rata rasio kemandirian fiskal tertinggi sebesar 229,92%, diikuti Banten sebesar 221,40% dan Jawa Barat sebesar 186,84%. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat.

Rasio belanja operasi juga mengalami peningkatan pada sebagian besar provinsi. Pada tahun 2024, wilayah Sulawesi memiliki rata-rata rasio belanja operasi tertinggi sebesar 71,94%. Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rata-rata rasio belanja operasi terbesar yaitu 78,66%, diikuti Gorontalo sebesar 71,28% dan Papua sebesar 69,26%. Tingginya proporsi belanja operasi

⁴² Gujarati and Porter, *Basic Econometrics*.

⁴³ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*.

mencerminkan besarnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan.

Jumlah tenaga kerja menunjukkan tren meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional. Kawasan Jawa memiliki rata-rata jumlah tenaga kerja terbesar, meningkat dari 12,44 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 13,62 juta jiwa pada tahun 2024. Pada tingkat provinsi, Jawa Barat mencatat rata-rata jumlah tenaga kerja tertinggi sebesar 23,23 juta jiwa, diikuti Jawa Timur sebesar 22,01 juta jiwa dan Jawa Tengah sebesar 19,01 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan estimasi regresi data panel, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan menghasilkan estimasi yang valid. Pengujian meliputi uji autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Menurut Sugiyono, pengujian tersebut merupakan asumsi yang umum digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh estimator yang konsisten dan efisien⁴⁴.

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik *Durbin-Watson* (DW). Hasil estimasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,81559. Nilai tersebut mendekati angka 2, sehingga mengindikasikan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model. Dengan demikian, residual pada model regresi tidak memiliki korelasi antarperiode pengamatan sehingga model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut⁴⁵.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat matriks korelasi antarvariabel independen. Hasil pengujian menunjukkan seluruh nilai korelasi berada di bawah batas kritis 0,85.

Tabel.1. Uji Multikolinearitas

Variabel	X1	X2	X3
X1	1.0000	0.0709	0.7503
X2	0.0709	1.0000	-0.0009
X3	0.7503	-0.0009	1.0000

Sumber: Data diolah menggunakan EViews

Nilai korelasi tertinggi sebesar **0,7503** terjadi antara rasio kemandirian fiskal dan tenaga kerja, namun masih berada di bawah ambang batas 0,85. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas⁴⁶.

c. Uji Heteroskedastisitas

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

⁴⁵ Gujarati and Porter, *Basic Econometrics*.

⁴⁶ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*.

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil pengujian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 2. Uji Heterokedasititas

Variabel	Probabilitas
X1	0.5266
X2	0.4926
X3	0.3936

Sumber: Data diolah menggunakan EViews

Seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi⁴⁷.

3. Hasil Estimasi Model

Analisis pengaruh rasio kemandirian fiskal, rasio belanja operasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia periode 2020–2024 dilakukan menggunakan regresi data panel. Sebelum estimasi dilakukan, model terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model tidak mengalami permasalahan autokorelasi, multikolinearitas, maupun heteroskedastisitas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Pemilihan model data panel dilakukan melalui *Uji Chow* dan *Uji Hausman*. Kedua pengujian menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga model yang paling sesuai digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik antarprovinsi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian.

Hasil estimasi Fixed Effect Model disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-57.5002	18.4843	-3.1108	0.0023
X1	4.5960	0.8437	5.4473	0.0000
X2	10.7356	0.9571	11.2163	0.0000
X3	-0.1168	1.2776	-0.0914	0.9273

Sumber: Data diolah menggunakan EViews.

Model regresi yang diperoleh adalah:

⁴⁷ Ghozali.

$$PE_{it} = -57,5002 + 4,5960Ln(KF_{it}) + 10,7356Ln(BO_{it}) - 0,1168Ln(TK_{it}) + e_{it}$$

Keterangan:

- PE_{it} = Laju pertumbuhan ekonomi
- $Ln(KF_{it})$ = Rasio Kemandirian fiskal
- $Ln(BO_{it})$ = Rasio Belanja operasi
- $Ln(TK_{it})$ = Tenaga kerja
- e_{it} = error term
- i = provinsi
- t = waktu

Hasil estimasi menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien sebesar 4,5960 mengindikasikan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah yang lebih mandiri secara fiskal cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menciptakan aktivitas ekonomi.

Rasio belanja operasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 10,7356. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk operasional, seperti belanja pegawai dan barang/jasa, mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan agregat dan pelayanan publik.

Sebaliknya, tenaga kerja memiliki koefisien negatif sebesar -0,1168 dan tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nyata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kuantitas tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas, produktivitas, dan kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal dan rasio belanja operasi merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia, sedangkan tenaga kerja belum memberikan pengaruh yang signifikan selama periode penelitian 2020–2024.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Hasil estimasi menunjukkan nilai F-statistic sebesar 11,402 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,0000. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal, rasio belanja operasi, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia periode 2020–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor fiskal daerah dan kondisi ketenagakerjaan secara bersama-sama berkontribusi dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi.

b. Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal dan rasio belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian fiskal memiliki koefisien sebesar 4,5960 dengan nilai probabilitas 0,0000, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Temuan ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui alokasi anggaran yang lebih efektif.

Rasio belanja operasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 10,7356 dan nilai probabilitas 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja operasional pemerintah daerah mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan konsumsi pemerintah dan penyediaan layanan publik.

Sebaliknya, tenaga kerja memiliki koefisien sebesar $-0,1168$ dengan nilai probabilitas 0,9273, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu diikuti oleh peningkatan produktivitas, sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,6890 menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal, rasio belanja operasi, dan tenaga kerja mampu menjelaskan 68,90% variasi pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode penelitian. Sementara itu, 31,10% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, inflasi, perkembangan teknologi, dan variabel makroekonomi lainnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik dalam menggambarkan variasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi dan antarwaktu.

5. Analisis dan Pembahasan

a. Pengaruh Kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi data panel, variabel Rasio Kemandirian Fiskal memiliki nilai koefisien sebesar 4,5960 nilai t-statistic sebesar 5.4473, dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen (0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber pendapatan sendiri, maka semakin baik pula kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Nilai koefisien positif mengindikasikan bahwa peningkatan rasio kemandirian fiskal akan diikuti peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi variabel lain konstan.

Secara teoritis, pengaruh positif rasio kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh *Wallace Oates*. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan lebih efisien dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi apabila memiliki kapasitas fiskal dan kewenangan yang memadai. Daerah yang mampu membiayai kebutuhan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung lebih fleksibel dalam menentukan prioritas pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, *Fiscal Federalism Theory* dari *Musgrave* menjelaskan bahwa kemandirian fiskal memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga alokasi anggaran menjadi lebih produktif dan berdampak pada peningkatan output regional⁴⁸.

Temuan ini relevan dengan kondisi Indonesia selama periode 2020–2024 yang merupakan fase pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada periode tersebut, daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM, pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan pelayanan publik, serta perluasan program perlindungan sosial. Provinsi dengan tingkat kemandirian fiskal tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali menunjukkan kemampuan pemulihan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.

⁴⁸ Oates, "Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism."

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian oleh Syahrini, Hidayat, dan Yulianita menemukan bahwa desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mendorong aktivitas ekonomi lokal⁴⁹. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Arifa, Syahnur, dan Abrar yang menunjukkan bahwa otonomi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi regional⁵⁰.

Selain itu, Hendana dkk melalui kajian literatur mengenai desentralisasi fiskal menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh kualitas pengelolaan keuangan daerah dan alokasi anggaran yang produktif⁵¹. Daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Hasil penelitian Sofilda, Hamzah, dan Kusairi juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan kemandirian daerah dan kualitas pembangunan manusia⁵².

Dalam konteks Indonesia, daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat karena didukung oleh sektor industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) memungkinkan pemerintah daerah memperluas pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang rendah masih cenderung bergantung pada transfer pemerintah pusat sehingga ruang fiskal yang dimiliki relatif terbatas.

Meskipun demikian, tidak seluruh penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Putra dan Hidayat menemukan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jambi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh variasi kapasitas fiskal daerah, efektivitas pengelolaan anggaran, kualitas institusi, serta

⁴⁹ Hidayat and Yulianita, "Fiscal Decentralization, Monetary Policy, and Economic Growth in Indonesia: A Panel Data Analysis."

⁵⁰ Arifa, Syahnur, and Abrar, "The Effect of Regional Financial Autonomy on Economic Growth in Aceh Province."

⁵¹ Hendana et al., "Fiscal Decentralization on Economic Growth (A Systematic Literature Review)."

⁵² Sofilda, Zilal Hamzah, and Kusairi, "Analysis of Fiscal Decentralisation, Human Development, and Regional Economic Growth in Indonesia."

perbedaan karakteristik ekonomi antarwilayah⁵³. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan penggunaan anggaran yang produktif.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pendapatan, pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, peningkatan kapasitas fiskal perlu diiringi dengan alokasi belanja yang produktif agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengaruh Belanja Operasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel rasio belanja operasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, sehingga hipotesis alternatif diterima. Koefisien sebesar 10.7356 mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi belanja operasi dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, semakin besar alokasi belanja operasi, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi yang tercipta di daerah, dengan asumsi variabel lain konstan.

Secara teoritis, pengaruh positif rasio belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui teori Keynesian yang menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat. Menurut Mankiw, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang secara langsung memengaruhi output ekonomi. Ketika pemerintah daerah meningkatkan belanja operasi, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pelayanan publik, maka pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi juga ikut meningkat⁵⁴. Selanjutnya, Blanchard dan Johnson menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat menciptakan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui peningkatan permintaan agregat⁵⁵.

Dalam konteks keuangan daerah, rasio belanja operasi mencerminkan

⁵³ Putra and Hidayat, "Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi."

⁵⁴ Mankiw, *Macroeconomics*.

⁵⁵ Blanchard, O., & Johnson, *Macroeconomics (6th Ed.)*.

tingkat dominasi pengeluaran rutin pemerintah dibandingkan dengan belanja produktif. Menurut, Mahmudi belanja operasi merupakan komponen utama dalam APBD yang digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Peningkatan belanja ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung dan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Namun, Mahmudi juga menekankan bahwa proporsi belanja operasi yang terlalu besar dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal yang lebih produktif⁵⁶.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Revy menemukan bahwa belanja operasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat⁵⁷. Fitriyani dan Wahida menganalisis belanja daerah (belanja operasi) dan menemukan pengaruh yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa⁵⁸. Panjaitan dkk menyatakan bahwa rasio belanja operasi memengaruhi kinerja keuangan daerah Kota Medan yang berdampak pada aktivitas ekonomi. Safira menemukan bahwa belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Sidoarjo, dengan elastisitas yang kuat dalam mendorong permintaan agregat⁵⁹. Pusung et al. menemukan bahwa realisasi belanja operasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang, meskipun secara simultan bersama belanja lainnya berpengaruh positif. Rahmanda dkk menunjukkan bahwa komponen belanja operasi (seperti belanja barang dan jasa) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. menemukan bahwa belanja tidak langsung (belanja operasi) memiliki pengaruh yang kurang kuat dibandingkan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional⁶⁰. Cornelia menyimpulkan bahwa belanja daerah termasuk belanja operasi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kota kupang⁶¹.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan variasi temuan, tetapi sebagian besar mengindikasikan bahwa belanja operasi memberikan kontribusi positif dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi.

⁵⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

⁵⁷ REVY, "ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA OPERASI DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA SUMATERA BARAT."

⁵⁸ Fitriyani and Wahida, "PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012-2018."

⁵⁹ Safira, "PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN SIDOARJO."

⁶⁰ Rahmanda et al., "Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi."

⁶¹ Simanjuntak et al., "PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA."

c. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel tenaga kerja memiliki nilai koefisien sebesar -0,1168, nilai t-statistic sebesar -0,0913, dan nilai probabilitas sebesar 0,9273. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen (0,05), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja cenderung diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi, namun hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak selalu menjadi faktor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak disertai peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dalam Teori Pertumbuhan Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Robert Solow, tenaga kerja memang merupakan salah satu faktor produksi utama, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Apabila peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan keterampilan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang memadai, maka tambahan tenaga kerja justru dapat menurunkan efisiensi produksi dan meningkatkan pengangguran terselubung⁶².

Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja di provinsi-provinsi Indonesia belum sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan tenaga kerja tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja formal dan produktif. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja di beberapa daerah masih terkonsentrasi pada sektor informal dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Akibatnya, peningkatan jumlah tenaga kerja belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan output ekonomi daerah.

Dalam konteks Indonesia tahun 2020–2024, kondisi ini sangat relevan dengan dinamika pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada periode tersebut, banyak daerah mengalami gangguan pasar tenaga kerja akibat penurunan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Meskipun jumlah tenaga kerja kembali meningkat setelah pandemi, kualitas penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya pulih. Banyak tenaga kerja terserap pada pekerjaan informal dan berproduktivitas rendah sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Selain itu,

⁶² Snowdon and Vane, *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*.

ketimpangan struktur ekonomi antarprovinsi menyebabkan kemampuan penyerapan tenaga kerja produktif juga berbeda-beda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian rosmeli yang menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tidak meratanya distribusi tenaga kerja produktif antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal apabila kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah serta penyerapan tenaga kerja produktif antar daerah belum merata⁶³.

Hasil penelitian lain juga menyatakan hal yang sama. Menurut, Adem dan Güngör yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dalam jumlah besar tidak otomatis meningkatkan output ekonomi jika tidak didukung oleh keterampilan dan produktivitas yang memadai⁶⁴.

Selanjutnya, Maury menemukan bahwa tenaga kerja hanya berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh capital deepening dan kemajuan teknologi produksi. Tanpa dukungan tersebut, kontribusi tenaga kerja menjadi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi⁶⁵. Selain itu, World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospects menjelaskan bahwa keterbatasan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh adanya skill mismatch di pasar tenaga kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan sektor industri modern⁶⁶.

Penelitian lain, Yuliana dan Firmansyah menemukan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja dan ketidakseimbangan penyerapan tenaga kerja antar sektor⁶⁷. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Putri, Kurniawan, dan Sari yang menunjukkan bahwa dominasi sektor informal di beberapa wilayah menyebabkan tenaga kerja tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah⁶⁸.

⁶³ Rosmeli, "DAMPAK INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA."

⁶⁴ Maury et al., "PENGARUH BELANJA MODAL DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA."

⁶⁵ Hung and Thanh, "Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Development: Empirical Evidence."

⁶⁶ Shah, *Fiscal Federalism*.

⁶⁷ Hidayat and Yulianita, "Fiscal Decentralization, Monetary Policy, and Economic Growth in Indonesia: A Panel Data Analysis."

⁶⁸ Kusuma et al., "Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2015-2022."

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tidak cukup menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja formal, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

6. Impikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal dan belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja modal tidak signifikan dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan, maka terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Pertama, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan ini dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan meningkatnya kemandirian fiskal, daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat

Kedua, terkait belanja operasi yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu menjaga agar belanja ini tetap efektif dan efisien. Belanja operasi, terutama belanja barang dan jasa, harus diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif dan pelayanan publik yang berkualitas. Namun demikian, pemerintah juga perlu mengendalikan dominasi belanja pegawai agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif.

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kebijakan ketenagakerjaan perlu lebih diarahkan pada peningkatan kualitas daripada kuantitas tenaga kerja. Pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, peningkatan keterampilan digital, serta penyelarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (*link and match*). Selain itu, penciptaan lapangan kerja formal melalui investasi dan pengembangan sektor industri perlu terus ditingkatkan agar tenaga kerja terserap secara produktif.

Keempat, secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau jumlah tenaga kerja, tetapi lebih pada efektivitas pengelolaan fiskal, kualitas belanja, serta produktivitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang lebih produktif, adaptif, dan berbasis hasil (*performance-based budgeting*), sehingga setiap pengeluaran pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja publik, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia secara berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024 mengalami pemulihan pascapandemi dengan pola yang berbeda antarwilayah. Wilayah Maluku–Papua dan Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi yang didukung oleh sektor pertambangan dan hilirisasi, sedangkan Pulau Jawa memiliki tingkat kemandirian fiskal dan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Di sisi lain, sebagian besar provinsi di kawasan timur Indonesia masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan ketergantungan yang cukup besar terhadap transfer pemerintah pusat.

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal dan rasio belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri serta optimalisasi belanja pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah. Sebaliknya, tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan produktivitas. Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal daerah dan pengelolaan belanja pemerintah yang efektif menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andersson, Järnberg, Linda, and Emelie Värja. "The Composition of Local Government Expenditure and Income Growth: The Case of Sweden." *Regional Studies* 57, no. 9 (September 2, 2023): 1784–97. <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2131755>.
- Arifa, Nuzul, Sofyan Syahnur, and Muhammad Abrar. "The Effect of Regional Financial Autonomy on Economic Growth in Aceh Province." *International Journal of Finance, Economics and Business* 3, no. 1 (March 31, 2024): 67–75. <https://doi.org/10.56225/ijfeb.v3i1.290>.
- Baye, A, and M Kreitner. *The Economics of Human Capital in the Knowledge Economy*. Cham: Springer, 2021.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. *Macroeconomics (6th Ed.)*. 6th ed. Boston, MA: Pearson. Pearson, 2013.
- BPS. *KetenagaKerjaan Provinsi, 2024*, 2024.
- . "STATISTIK INDONESIA 2024," 2025.
- Digdowniseiso, Kumba. "Four Decades of Research in Fiscal Decentralization: A

- Bibliometric and Content Analysis.” *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 16 (December 18, 2024): 4283. <https://doi.org/10.24294/jipd4283>.
- Ehrenberg, R. G., and R. S. Smith. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. Edisi Ke 14. New York: NY: Routledge, 2021.
- Fitriyani, Ika, and Nurul Wahida. “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2020).
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi Terbaru. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., 2021.
- Gujarati, D. N., and Porter. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill, 2021.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Handari, Wahyu Dwi, and Isnandar. “Indikator Pasar Tenaga Kerja Di Indonesia Berdasarkan Kerangka Key Indicators of the Labour Market (KILM).” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 4 (June 27, 2025): 2867–75. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.4950>.
- Hanif, Imran, Sally Wallace, and Pilar Gago-de-Santos. “Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries.” *Sage Open* 10, no. 4 (October 23, 2020). <https://doi.org/10.1177/2158244020968088>.
- Hendana, Deni, Lioni Indrayani, Anggun Anggraini, Dasrul Daniyal, and Rizka Wahyuni Amelia. “Fiscal Decentralization on Economic Growth (A Systematic Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1 (April 30, 2025): 32–52. <https://doi.org/10.23960/jep.v14i1.3950>.
- Hidayat, Ariodillah, and Anna Yulianita. “Fiscal Decentralization, Monetary Policy, and Economic Growth in Indonesia: A Panel Data Analysis.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 13, no. 4 (2025): 2355–8520. <https://doi.org/10.22437/ppd.v13i4.42111>.
- Hung, Nguyen Thanh, and Su Dinh Thanh. “Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Development: Empirical Evidence.” *Cogent Economics & Finance* 10, no. 1 (December 31, 2022). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>.
- Irmanelly, Amri Amir, Zamzami, and Syparuddin. “Economic Growth Inclusivity in Sumatra Province.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5 (2022): 103–15. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.3583>.
- Kemenkeu. “Portal Data APBD.” Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia., May 9, 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas. “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Indonesia Emas 2045 (Rancangan Akhir / Publikasi). Bappenas. .” Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
- Kuncoro, Mudrajad. “Desentralisasi Fiskal Sebagai Alternatif Menggali Sumber Dana Pembangunan Dan Mewujudkan Otonomi Daerah.” *Economic Journal of Emerging Markets*, October 19, 2016, 22–34. <https://doi.org/10.20885/ejem.v6i1.6640>.
- Kusuma, Rhima, Rivana Maharani, Septi Nur Sari, and Muhammad Kurniawan.

- “Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2015-2022.” *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 3 (June 3, 2024): 18–31. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.618>.
- Lestari, Fitri Indah, Ni Wayan, and Kembar Sri Budhi. “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Indonesia, Investasi Dan Remitansi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 11, no. 8 (August 20, 2022): 3043. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i08.p06>.
- Lewis, Blane D. “Indonesia’s New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 1 (January 2, 2023): 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics*. Edisi 11. New York: Worth Publishers, 2021.
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru. Vol. Penerbit Andi. Yogyakarta: Penerbit Andi, ISBN: 978-979-29-6317-7., 2018.
- Mauri, Gita Anjely, Anderson G Kumenaung, Amran T Naukoko, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. “Pengaruh Belanja Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 23, 2023.
- Musgrave, Richard, and P. B Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: Tata McGraw-Hill Education., 2017.
- Nugrah, Jumriani, and Firmansyah. “Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.” *Journal AK-99*. Vol. 3, 2023.
- Oates, Wallace E. “Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism.” *International Tax and Public Finance* 12, no. 4 (August 2005): 349–73. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>.
- Putra, Rico, and Surya Hidayat. “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.” *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 3, no. 4 (June 5, 2016): 243–56. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>.
- Qian, Yingyi, and Gérard Roland. “Federalism and the Soft Budget Constraint.” *SSRN Electronic Journal*, 1999. <https://doi.org/10.2139/ssrn.149988>.
- Rahmanda, Ruwina, Reisyah Andini, Chesia Rika Adrilia Br Sitepu, Vincensius Maruli Tua Malau, and Andryno Toty N. Banjarnahor. “Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (December 1, 2025): 2413–23. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3586>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*, 2004.
- REVVY, RACHMAWAT. “Analisis Pengaruh Belanja Modal, Belanja Operasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sumatera Barat.” Universitas Andalas, 2019.
- Rosmeli, Rosmeli. “Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 10, no. 2 (December 9, 2015). <https://doi.org/10.22437/paradigma.v10i2.3681>.

- Saddam, Siti Zaitun, Mohamad Nizam Jaafar, Amirul Afif Muhamat, Nurien Syahirah Mohd Nizam, and Nurin Aqilah Halim. "Determinants of Islamic Banks' Stability in Malaysia and Indonesia." *The Indonesian Capital Market Review* 16, no. 1 (January 1, 2024): 17–29. <https://doi.org/10.21002/icmr.v16i1.1193>.
- Safira, Tina. "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten Sidoarjo," 2026.
- Sambodo, Maxensius Tri, Nur Firdaus, Pihri Buhaerah, Tuti Ermawati, and Felix Wisnu Handoyo. *Diskursus Kebijakan Pembangunan*. Edited by Maxensius Tri Sambodo. LIPI Press, 2021. <https://doi.org/10.14203/press.261>.
- Sarundajang, S. H. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Shah, Anwar. *Fiscal Federalism*. Washington DC: World Bank, 2016.
- Simanjuntak, Gloria Yemima, Maya Yulika, Dewi Nopika Putri, and Wahjoe Pangestoeti. "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 6 (June 14, 2025): 260–73. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5158>.
- Snowdon, B., and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing., 2021.
- Sofilda, Eleonora, Muhammad Zilal Hamzah, and Suhal Kusairi. "Analysis of Fiscal Decentralisation, Human Development, and Regional Economic Growth in Indonesia." *Cogent Economics & Finance* 11, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Todaro, M. P., and S. C Smith. *Economic Development (13th Ed.)*. Pearson Education., 2020.
- World Bank. "Indonesia Economic Prospects." Washington, DC: , 2023.
- . "Running Faster, for Longer: Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs (Indonesia Country Growth and Jobs Report). ." Washington, DC, 2026.